



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 134, September 2020



Refleksi 75 Tahun: Republik dan Kita, Gubernur Lemhannas RI jadi Narasumber ..	2
Munas IKAL IV, Agum Gumelar terpilih Menjadi Ketua Umum IKAL kembali	3
Gubernur Lemhannas RI Menjadi Pembicara di Webinar Balitbang Kumham..	4
Lemhannas RI dan BIN Tingkatkan Kerja Sama	5
Jadi Pembicara Kunci, Gubernur Lemhannas RI Singgung Hasil Proses Kepemimpinan.....	6
Diskusi Panel PPRA 61 tentang Penerapan IPTEK.....	7
Gubernur Lemhannas RI Hadiri Peresmian AB Susanto Center dan Bedah Buku Manajemen Bela Negara	8
Pembekalan Gubernur Lemhannas RI kepada Mahasiswa Baru UIN Syarif Hidayatullah	9
Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang undangan terkait dengan Pengendalian Covid-19.....	10
Gubernur Lemhannas RI Memberikan Pembekalan kepada Peserta Pelatihan Untuk Pelatih/ <i>Training of Trainers</i> (ToT).....	11

Gubernur Lemhannas RI Memberikan Pembekalan kepada Peserta Pelatihan Untuk Pelatih/ *Training of Trainers* (ToT)

Refleksi 75 Tahun: Republik dan Kita, Gubernur Lemhannas RI jadi Narasumber



”

Sistem pendidikan di Indonesia perlu pengkajian dan tinjauan kembali secara menyeluruh

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

terikat dengan nilai kolektivisme sosial dalam ikatan kelompok. “Pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini,” kata Agus.

“Sistem pendidikan di Indonesia perlu pengkajian dan tinjauan kembali secara menyeluruh,” saran Agus. Pengkajian dan peninjauan kembali yang dilakukan pun tidak bisa hanya melihat aspek teknis saja, tetapi aspek lainnya seperti juga kompetensi tenaga pengajar juga harus dilibatkan.

Agus menyampaikan bahwa atas hal tersebut disadari bahwa tidak dapat dipungkiri pengaruh saling keterkaitan dan kesinambungan memiliki implikasi dalam proses belajar. “Garis kesinambungan tersebut yang perlu kita indentifikasi dengan penelusuran kilas balik sejak perjalanan sejarah selama 75 tahun merdeka dalam inventarisasi apa yang telah kita capai, memahami apa yang hendak kita capai dan bagaimana kita mencapainya dengan menutup kekurangan-kekurangan yang bisa kita indentifikasi selama perjalanan selama ini,” ujar Agus.

Oleh karena itu, Agus memandang diperlukan penyusunan peta jalan dalam mencapai pembangun SDM sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna menyongsong tantangan dinamika lingkungan strategis di masa depan.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber Dialog Publik dan Republik Forum Sahabat yang mengangkat topik “Refleksi 75 Tahun: Republik dan Kita”, pada Selasa (25/8) secara virtual. Menurut Agus, kita tidak bisa menganalisis satu aspek secara khusus, terpisah dari aspek-aspek lainnya, oleh karenanya salah satu refleksi 75 tahun kemerdekaan adalah harus menyadari bahwa semua menjadi satu dan saling mempengaruhi.

Agus mengangkat contoh dalam bidang ketahanan nasional, yakni awalnya ada asumsi bahwa sumber dari kesejahteraan ada pada aspek ekonomi. Tetapi ternyata ekonomi ditentukan oleh aspek lainnya, yakni kesehatan. Aspek kesehatan sendiri juga ditentukan oleh kualitas kondisi tiap-tiap manusia. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi refleksi bahwa ada faktor lain diluar ekonomi yang berimplikasi terhadap ekonomi. “Sehingga harus melihatnya secara komprehensif,” ujar Agus.

Untuk melihat secara komprehensif, kaitan satu aspek dengan aspek lain perlu memusatkan

perhatian khususnya pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Saya melihat bahwa aspek apapun yang akan diimplementasikan dan diaktualisasikan oleh manusia, pertama-tama yang harus kita bangun dan kita olah adalah sumber daya manusianya,” tutur Agus.

Kemudian Agus menyampaikan indikator pertama yang dilihat dari data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional, dari data tersebut terlihat bahwa Indonesia dalam bidang pendidikan masih berada diposisi yang kurang memuaskan. Indikator selanjutnya adalah hasil Programme For International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organization for Economic Cooperation Development (OECD) yang terdiri dari partisipasi 78 negara diantaranya 37 negara maju dengan indikator perkembangan manusia yang tinggi.

Di sisi lain Agus memandang bahwa pendidikan karakter diperlukan, terlebih ditengah kompleksitas globalisasi. Penanaman nilai moral individu diperlukan guna menjaga konsistensi dan komitmen individu manusia sebagai makhluk sosial yang

Munas IKAL IV, Agum Gumelar terpilih Menjadi Ketua Umum IKAL kembali



Katan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IV guna menentukan kepengurusan IKAL periode berikutnya pada Kamis (27/8), di Ruang Dwi Warna, Gedung Pancagatra, yang juga disiarkan secara virtual agar dapat diikuti oleh para peserta yang tidak dapat hadir di tempat penyelenggaraan.

Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia Munas IV IKAL atas kerja kerasnya sehingga Munas tersebut dapat terlaksana. Tidak lupa Agum juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI atas dukungan dan kerja sama pada setiap kegiatan IKAL selama ini. "Saya sangat berharap, siapapun gubernurnya nanti dan siapapun Ketua Umum IKALnya nanti, hubungan kerja seperti ini tetap bisa terlaksana dengan baik," kata Agum.

Agum berpesan kepada seluruh peserta Munas IV IKAL agar melaksanakan Munas IV dengan penuh Pengertian dan sungguh-sungguh dengan mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku. Tidak lupa

Agum juga menyampaikan agar para peserta melaksanakan Munas penuh dengan kegembiraan dan kerja sama. "Munas ini adalah Munas IKAL, suatu organisasi yang begitu prestisius. Jadi saya mohon betul kepada seluruh peserta untuk mengikutinya dengan penuh rasa kerja sama, kebersamaan, dan gembira," kata Agum.

Sementara itu Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa ditengah pasang surut dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam 5 tahun terakhir, IKAL senantiasa menunjukan komitmen dan konsistensinya dalam memberikan berbagai sumbangsinya baik tenaga, pemikiran, materi maupun moril bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Agus, capaian tersebut tentu tidak terlepas dari kualitas, integritas, dan soliditas kepengurusan IKAL masa bakti 2015-2020. Hal tersebut harus dijadikan sebagai motivasi dan sumber inspirasi untuk memantapkan langkah dan pikiran dalam menentukan kepengurusan IKAL periode berikutnya, agar IKAL semakin tumbuh dan berkembang

sebagai tempat bersandar bagi seluruh komponen bangsa yang mendambakan Indonesia yang bersatu, maju, dan sejahtera.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa IKAL di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah organisasi yang strategis," ujar Agus. Menurut Agus, hal tersebut bukan saja karena cerminan dari kurikulum Lemhannas RI yang telah dibekalkan kepada para anggota IKAL, tetapi juga merupakan cerminan dari struktur organisasi IKAL sendiri.

Dipenghujung sambutannya, Agus menyampaikan bahwa reputasi dan nama sebuah lembaga pendidikan akan selalu dibawa dan dicerminkan oleh sikap dan perilaku para alumninya, begitu pula dengan Lemhannas RI. "Untuk itu kami selalu mengingatkan dan menitipkan bahwa kemanapun anggota IKAL berada, di dalam sikap dan perilakunya akan selalu membawa nama Lemhannas RI," kata Agus.

Setelah serangkaian kegiatan, akhirnya Munas IV IKAL menetapkan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar kembali terpilih menjadi Ketua Umum IKAL Masa Bakti 2020-2025.

Gubernur Lemhannas RI Menjadi Pembicara di Webinar Balitbang Kumham



Ketahanan nasional merupakan kondisi atau hasil yang digunakan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara dalam Webinar Opini Seri 8: Refleksi 75 Tahun Pluralisme Indonesia yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Kumham) Kementerian Hukum dan HAM, pada Kamis (27/8) secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Pluralisme adalah sebuah pemikiran kolektif bangsa yang terbangun dari kekuatan persatuan di tengah keberagaman.

Dalam memahami makna pluralisme dalam konteks persatuan dibutuhkan kesamaan pandangan, sikap, dan pemikiran. Agus juga menegaskan bahwa perlu adanya kesadaran bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa membutuhkan persatuan.

Agus juga mengaitkan pluralisme dengan realitas kekinian. Menurut Agus,

era globalisasi tidak selalu membawa kemudahan dalam mencapai solusi permasalahan bangsa. Penetrasi informasi yang intens dan tidak mengenal batas wilayah dinilai rentan menimbulkan persoalan baru yang berdampak luas bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, memandang pluralisme dalam persatuan memerlukan kematangan pada perseorangan dan juga kelompok.

Menurut Agus, jika kondisi ketahanan nasional kuat, pluralisme seharusnya dapat diwujudkan dengan baik. "Jika kondisi ketahanan nasional kuat, pluralisme seharusnya dapat diwujudkan dengan baik dan digunakan dalam mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan," kata Agus.

Agus menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi atau hasil yang digunakan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Ketahanan nasional, jelas Agus, dapat diwujudkan dengan pendekatan gatra ideologi,

gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan, serta gatra spasial geografis melalui keadaan masing-masing provinsi. Bila ketahanan tiap-tiap gatra bisa dibangun dan bisa dicapai dengan baik, maka ketahanan nasional bisa dikatakan dalam situasi baik. Namun, jika ada salah satu gatra yang lemah maka akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional.

Lebih lanjut Agus menyampaikan beberapa pemikiran dalam merespon tantangan pluralisme. Menurut Agus, aspirasi masyarakat harus difasilitasi dengan membentuk forum musyawarah. Selanjutnya Agus juga menyarankan adanya pembinaan atas berbagai lembaga keagamaan dan perbaikan kurikulum pendidikan yang menyebarkan kultur, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan. "Mengaktifkan kembali berbagai kegiatan yang berisi penanaman nilai-nilai kebangsaan," ujar Agus.

Lemhannas RI dan BIN Tingkatkan Kerja Sama



Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S. H., M.Hum. mengunjungi Lemhannas RI dan diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, pada Jumat, (28/8), di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI.

Dalam kunjungan yang menerapkan protokol kesehatan, Sekretaris Utama BIN didampingi beberapa jajarannya, yakni Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Laksma TNI Dr. Ivan Yulivan, M.M., SHRMP, M.Tr (Han), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) BIN Dr. Armi Susandi, M.T, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) BIN Brigjen TNI R. Toto Oktaviana, S.Sos., Kepala Biro - 03 Gede Agung Patra Wicaksana, S.H., M.H, Staf Khusus Kepala BIN Riri Satria, S.Kom., M.M., ACP., DBA(c), dan Staf Khusus Wakil Kepala BIN Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Soemantri.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kerja sama antara kedua instansi terutama kerja sama yang terkait dengan prediksi ancaman nasional ke depan. "Lemhannas RI tentunya memiliki *data base* yang lebih komprehensif dalam hal ini," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa data yang dimiliki Lemhannas RI dapat memperkaya indeks ancaman nasional yang disusun BIN, sehingga indeks ancaman nasional yang disusun menjadi lebih spesifik dan berkualitas. Indeks tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai panduan instansi dalam bekerja dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas).

"Kami juga berharap bisa ada kerja sama berkaitan dengan peningkatan di bidang pendidikan," ujar Bambang. Dalam hal tersebut Bambang menyampaikan kemungkinan jajaran BIN untuk dimanfaatkan menjadi

narasumber dan personel BIN bisa menjadi peserta pendidikan.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan kemungkinan kerja sama dalam menyusun kajian sehingga akan meningkatkan kualitas data, analisis, dan hasil kajian. "Tentunya ini akan berpengaruh terhadap kinerja kita, yang secara sinergi antar lembaga ini menjadi sangat penting sekali kedepannya," tutur Bambang.

Menurut Agus, Lemhannas RI sangat terbuka atas kerja sama yang ingin dilakukan. Kerja sama yang dilakukan bukan hanya tentang saling menggunakan hasil akhir yang telah disusun, namun dari proses diskusi dan penyusunan.

"Kami selalu terbuka apalagi yang berkaitan dengan fungsi dan peran Lemhannas RI untuk masuk di berbagai program pendidikan yang ada di Lemhannas, kerja sama peningkatan kapasitas, kami selalu terbuka," kata Agus.

Jadi Pembicara Kunci, Gubernur Lemhannas RI Singgung Hasil Proses Kepemimpinan



Hasil sebuah proses kepemimpinan tidak kita lihat pada pemimpinnya, tetapi pada organisasinya dan pada anggotanya

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara kunci pada Webinar Kepemimpinan Strategis Terkait Integritas Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Jabatannya yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), pada Rabu (2/9) secara virtual.

“Hasil sebuah proses kepemimpinan tidak kita lihat pada pemimpinnya, tetapi pada organisasinya dan pada anggotanya,” kata Agus. Menurut Agus, hasil sebuah proses kepemimpinan dapat terlihat dari organisasi yang dipimpin apakah menjadi lebih efisien dan efektif atau sebaliknya.

Selain itu, hasil sebuah proses kepemimpinan juga dapat dilihat dari anggotanya, apakah anggotanya menjadi lebih kompeten, terampil, dapat bekerja sama, dan mengikuti perkembangan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa hasil proses kepemimpinan dilihat dari organisasi dan kinerja anggota pada pelaksanaan tugas pokok.

Oleh karena itu, Agus berpesan bahwa anggota Ikatan Notaris Indonesia perlu mempunyai kemampuan untuk membaca perkembangan lingkungan strategis dan mengantisipasi perubahan. Yang dimaksud dengan mampu mengantisipasi perubahan yakni, mengenai dinamika, mengenai peraturan perundang-undangan dan mengenai proses transformasi yang bersifat irasional.

Notaris sebagai pemimpin strategis perlu memiliki keluwesan atau fleksibilitas guna menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan.

“Perubahan sekarang ini begitu cepat dan begitu drastis, sehingga kalau kita terlena di dalam sikap *bussiness as usual*, kita bisa ketinggalan kereta,” ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut Agus juga mengingatkan bahwa dalam menghadapi era digital, keahlian *softskill* sangat diperlukan. Hal tersebut juga berlaku bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia, bahwa *softskill* akan sangat banyak digunakan dan diperlukan bagi para anggota Ikatan Notaris Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya.



**KEPEMIMPINAN STRATEGIS TERKAIT INTEGRITAS
NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM
MENJALANKAN JABATANNYA**

DISAMPAIKAN OLEH:
LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO
GUBERNUR LEMHANNAS RI

JAKARTA, 2 SEPTEMBER 2020



Diskusi Panel PPRA 61 tentang Penerapan IPTEK



Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Reini Wirahadikusumah MSCE, Ph.D., Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, dan Komisariss Utama PT. Len Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc menjadi narasumber pada diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 Lemhannas RI, Rabu (9/9), secara virtual.

Prof. Reini Wirahadikusumah dalam paparannya menyampaikan bahwa strategi pembangunan yang harus dilakukan adalah pemerataan infrastruktur serta konektivitas wilayah Indonesia, pemanfaatan teknologi maju untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. "Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam penguasaan IPTEK sangat diperlukan," kata Reini.

Sementara, Kukuh menjelaskan bahwa tujuan standarisasi dalam

hilirisasi dan inovasi adalah terciptanya produk yang lebih canggih, lebih murah, aman, mudah digunakan, dan ramah lingkungan. Adanya standarisasi yang ditetapkan membuat produsen memiliki acuan agar barang atau jasa yang dihasilkan bisa diterima dan digunakan oleh masyarakat.

Pemberlakuan standarisasi juga dapat mendukung transformasi strategi dalam peningkatan daya saing. Standarisasi di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) awalnya didorong dan diwajibkan oleh pemerintah, namun saat ini, penerapan SNI sedang dalam proses menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri sebagai dorongan untuk berinovasi.

Standarisasi yang dikarenakan pemberlakuan SNI secara wajib bersifat statis, berbasis penegakan hukum, menjadi persyaratan minimum, terbatas pada pasar nasional, dan berbasis kepatuhan. Sedangkan, standarisasi sebagai dorongan untuk berinovasi

akan bersifat dinamis, berbasis perkembangan IPTEK, penilaian oleh publik sebagai pengguna, berbasis nasional yang menuju pasar regional dan global, berbasis keinginan membuktikan kesesuaian dan memperoleh kepercayaan.

Sedangkan Komisariss Utama PT. Len Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc. PT. Len Industri mengatakan bahwa sudah menyediakan sejumlah *fiber optic* sehingga menambah kapasitas *bandwidth* yang akan mendukung optimalisasi penggunaan IPTEK. Hal tersebut juga diharapkan akan mendukung peningkatan kualitas individu yang akan meningkatkan kualitas masyarakat.

Leo menyampaikan bahwa pentingnya investasi pada bidang riset dan kemitraan *triple helix*. Kemitraan *triple helix*, yakni antara pemerintah, pihak swasta, dan akademisi diharapkan akan menyerap, memahami, mengetahui, dan menguasai teknologi untuk kemajuan masa depan.

Gubernur Lemhannas RI Hadiri Peresmian AB Susanto Center dan Bedah Buku Manajemen Bela Negara



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri peresmian pendirian AB Susanto Center untuk Pusat Internalisasi dan Penggerak Manajemen Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ) dan Bedah Buku Manajemen Bela Negara: Pendekatan Modern Menjadi Bangsa Yang Besar karya AB Susanto pada Rabu (9/9) di UPN VJ.

Dilansir dari upnvj.ac.id, Wakil Pimpinan Redaksi Harian Kompas Tri Agung Kristanto selaku moderator mengatakan buku tersebut menegaskan bahwa apa pun yang dilakukan dan didedikasikan untuk negara dapat berkontribusi dalam Bela Negara. Di halaman lima dalam buku Manajemen Bela Negara tertulis "salah satu bentuk penyegaran semangat Bela Negara ini ialah dengan memperluas makna Bela Negara". Bela Negara tidak hanya identik dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) namun memiliki makna yang lebih luas.

Salah satu bentuk penyegaran semangat bela negara adalah dengan memperluas makna bela negara. "Kalau kita melihat bela negara, bela negara itu bukan merupakan kepentingan pertahanan saja, bela negara itu bukan kepentingan TNI saja. Tetapi bela negara merupakan kepentingan nasional," kata Agus dalam tanggapannya.

Menurut Agus, konotasi bela negara yang identik dengan kepentingan pertahanan dikarenakan gagasannya lahir dari Kementerian Pertahanan. Maka, komunikasi dan sosialisasi yang menjelaskan Bela Negara dengan posisi yang proporsional dalam fungsi-fungsi ketatanegaraan maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat diperlukan.

"Sebetulnya bela negara ini merupakan kepentingan nasional, seyogyanya memang lahir dari sebuah lembaga pada tingkat nasional yang bersifat strategis dan dijabarkan menurut fungsi masing-masing atau kepada instansi fungsional," ujar Agus.

Oleh karena itu, Agus mendorong agar aplikasi, implementasi dari gagasan bela negara bisa semakin diimbangi dengan peran-peran non TNI dan non Polri. Menurut Agus ada kesinambungan yang dapat dijalin, yakni kepada lembaga-lembaga TNI dan Polri bisa berkontribusi memberikan pelatihan dalam bidang-bidang yang diperlukan seperti pelatihan membangun disiplin.

Namun, manajemen penyelenggaraan lebih besar porsinya diberikan kepada lembaga non TNI dan non Polri. Agus juga menyampaikan Peraturan Menteri ketika dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, yang menyebutkan bahwa terdapat lima elemen bela negara dan hanya satu yang terkait dengan kompetensi keprajuritan, yaitu membangun kemampuan awal untuk kekuatan pertahanan.

Pembekalan Gubernur Lemhannas RI kepada Mahasiswa Baru UIN Syarif Hidayatullah

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pembekalan dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada acara yang mengangkat tema “Bersama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sukses Studi dan Berkarya Mengadapi Era Baru”, Agus memberikan pembekalan mengenai Wawasan Kebangsaan.

“Kalau kita bicara wawasan kebangsaan, kita perlu untuk memahami apa arti wawasan kebangsaan,” kata Agus mengawali pembekalannya. Agus menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah sudut pandang seseorang mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Agus menekankan pada kalimat persatuan dan kesatuan wilayah mengingat bentuk geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan. Secara umum dikatakan bahwa pulau-pulau di negara kepulauan dipisahkan oleh perairan, tetapi dalam wawasan kebangsaan, perairan justru akan menyatukan pulau-pulau dan menyatukan nilai kebangsaan.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan NKRI berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, wawasan kebangsaan juga tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang kaku, yaitu patriotisme dengan tujuan negatif.

Menurut Agus, negara Indonesia yang bersatu dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terutama di era globalisasi,



yakni batas-batas antarbangsa sudah semakin memudar dan kompetisi antarbangsa semakin terbuka.

Oleh karena itu, Wawasan Kebangsaan harus selalu berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan berhasil menjalankan misi ditengah kehidupan tata negara di dunia. “Hanya bangsa yang siap dan unggul dalam berkompetisi yang akan bisa untuk menjadi bangsa yang besar,” ujar Agus.

Agus menuturkan bahwa bangsa Indonesia tidak ditentukan melalui komposisi mayoritas dan minoritas. Menurut Agus, hal tersebut adalah sebuah nilai yang sangat berharga ditengah kebhinnekaan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nilai tersebut tidak hanya diperkuat oleh wawasan kebangsaan, tetapi diperkuat juga melalui paradigma nasional lainnya, yakni wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Agus menyebutkan bahwa tantangan bagi wawasan kebangsaan dalam era kini adalah bagaimana memaknai nilai intrinsik dari nilai-nilai yang diwarisi dari jaman perjuangan di



Hanya bangsa yang siap dan unggul dalam berkompetisi yang akan bisa untuk menjadi bangsa yang besar

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

masa lalu untuk ditransformasikan ke dalam instrumental operasional dalam bangsa Indonesia dan lingkungan strategis yang telah berubah. Tantangan lainnya yang dihadapi pada dasarnya terdiri dari tantangan yang berasal dari globalisasi, karakter bangsa, dan revolusi industri 4.0.

Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang undangan terkait dengan Pengendalian Covid-19



PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19

B. WISNU WIDJAJA
DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI
BNPB

Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Hukum dan Peraturan Perundang undangan terkait dengan tema “Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pengendalian Covid-19” secara daring, pada Kamis (10/9) yang menghadirkan Deputy Bidang Sistem dan Strategi BNPB Ir. Bernardus Wisnu Wijaya, M.Sc sebagai pembicara.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma Budi Setiawan, S.T. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa saat ini Covid-19 telah merebak ke 34 provinsi di Indonesia dan mengalami peningkatan yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan daerah episentrum dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 tertinggi. Hal tersebut, lanjut Budi Setiawan, dikarenakan kepadatan dan mobilitas penduduk serta rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Jumlah Pasien terkonfirmasi Covid-19 yang semakin mengalami peningkatan menjadi urgensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan berupa

Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dengan adanya sosialisasi tersebut, lanjut Budi Setiawan, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para peserta sosialisasi dan mengikuti peraturan terkait peningkatan disiplin dan penegakan protokol Kesehatan.

Dalam paparannya, Wisnu memaparkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 untuk penegakan kedisiplinan. Namun aturan tersebut, jelas Wisnu, tidak dapat secara penuh diterapkan dengan ancaman dan situasi kondisi sosial seperti saat ini. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berbeda dengan negara sosialis seperti Tiongkok dan Vietnam. Di Indonesia, lanjut Wisnu, terdapat permasalahan yang lebih kompleks dan

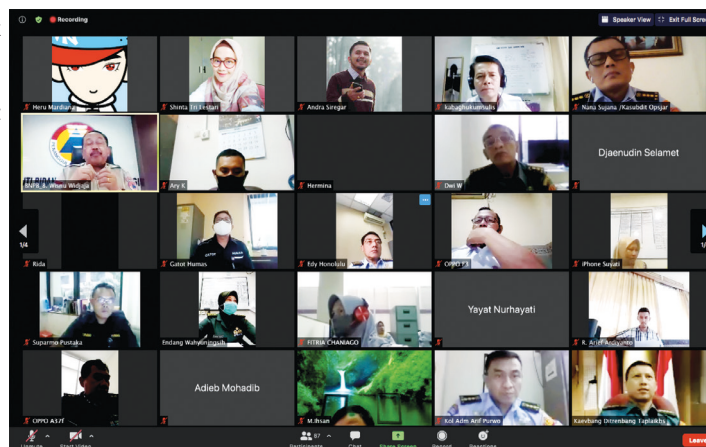
saling terkait seperti masalah ekonomi, sosial dan dapat berkembang ke masalah keamanan.

“Di sini, Semua permasalahan itu saling terkait dan tidak dapat diselesaikan satu-persatu. Maka kita atur keseimbangannya, kapan kita tekan faktor Kesehatan dan kapan tekan masalah ekonomi,” jelas Wisnu. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Perpres nomor 82 Tahun 2020 yang menggabungkan permasalahan ekonomi dan Kesehatan.

Wisnu menjelaskan bahwa tugas BNPB adalah sebagai monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Sedangkan yang bertugas melakukan sosialisasi adalah Kementerian Dalam Negeri dan jajarannya hingga ke pemerintah daerah.

Wisnu memaparkan sejak awal munculnya Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menanggulangi Covid-19. Kepatuhan masyarakat saat itu dinilai tinggi karena dan berhasil sedikit menekan laju pertumbuhan penyebaran Covid-19.

Namun, kondisi ekonomi yang memburuk mendorong adanya pelanggaran aktivitas ekonomi yang menyebabkan menurunnya kepatuhan dan berakibat pada meningkatnya kasus sampai saat ini. Maka dari itu, jelas Wisnu, upaya penegakan hukum dipandang perlu sejalan dengan upaya memberikan sarana untuk menjalankan kepatuhan.



Gubernur Lemhannas RI Memberikan Pembekalan kepada Peserta Pelatihan Untuk Pelatih/*Training of Trainers* (ToT)



Dalam setiap presentasi dari tenaga pemateri, kuras sebanyak-banyaknya pengetahuan yang ada pada pemateri," ujar Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers* (ToT), pada Senin (14/9) secara virtual.

Dalam pembekalan tersebut, Agus menyampaikan bahwa para peserta Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers* (ToT) harus mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya selama mengikuti kegiatan, karena pengetahuan tersebut akan digunakan saat peserta kembali menjalankan tugas menjadi pengajar. "Hal itu juga didasarkan pada tugas para peserta nantinya yang adalah sebagai *trainers*, yakni memberikan pemahaman kepada peserta atas pentingnya substansi atau materi," ucap Agus.

Menurut Agus, jika seorang pelatih kurang memahami mengenai sebuah substansi atau materi maka akan sulit untuk seorang pelatih memberikan

pemahaman terhadap peserta pelatihnnya. Oleh karena itu, seluruh peserta dihimbau untuk menggunakan kesempatan dalam Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers* (ToT) untuk bisa melengkapi amunisi pengetahuan dan amunisi pembekalan yang diperlukan oleh pelatih dalam melanjutkan tugas.

Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa dalam menyampaikan materi, para pelatih harus menentukan cara pendekatan sesuai dengan peserta didik. Penyampaian materi kepada siswa pendidikan pertama, siswa pendidikan atas, dan siswa pendidikan tinggi memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menegaskan bahwa yang paling penting adalah cara menyampaikan pesan agar para peserta didik dapat menerima pesan itu dengan tepat karena hal tersebut merupakan bagian penting dalam sebuah pelatihan. "Jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada salah penafsiran," kata Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Agus menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi atau hasil yang digunakan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Ketahanan nasional sendiri dapat diwujudkan melalui pendekatan gatra ideologi, gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan, serta gatra spasial geografis melalui keadaan setiap provinsi.

Kondisi ketahanan tiap-tiap gatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Jika ketahanan tiap-tiap gatra bisa dibangun dan bisa dicapai dengan baik, maka ketahanan nasional bisa dikatakan dalam situasi baik. "Salah satu saja dalam keadaan (gatra) yang tidak baik, maka ketahanan nasional akan sangat terpengaruh," tutur Agus.



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Pembuat Artikel: **Naomi Augustina** Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia**

Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>